Resolusi Konflik Terhadap Pesta Demokrasi (Analisis Sosio-Politik Pemilihan Kepala Daerah di Bulukumba)

St. Haniah¹, Sam'un Mukramin²

¹²Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

¹Email: haniah@unismuh.ac.id

Abstrak. Pilkada selalu mengalami kompleksitas permasalahan yang berujung pada konflik sosial berkepanjangan tanpa evaluasi yang masif untuk meminimalisirnya. Tak sedikit pula yang terjadi, yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat dan instansi pemerintah yang turut serta dalam kontes tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan penyelesaian konflik di Kabupaten Bulukumba akibat pesta demokrasi Pilkada. Metode penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, verifikasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan keabsahan data. Diantara resolusi konflik yang dirumuskan, yaitu: a) kearifan lokal merupakan lokomotif perdamaian untuk meminimalisir konflik sosial yang berujung pada disintegrasi sosial. Tahap implementasi merupakan kesadaran kolektif yang dibangun oleh masyarakat setempat sendiri sebagai bangunan esensial bagi nilai dan norma yang ada, b) Adaptasi peran dan fungsi kelembagaan dalam mendobrak dan menerapkan aturan merupakan keunggulan potensial sebagai fungsi laten dan fungsi nyata. dalam mencegah konflik sosial yang akan terjadi, baik aspek mikro maupun makro yang mengarah pada gerakan preventif, persuasif dan peran represif, dan c) Untuk menekan perilaku menyimpang selama proses pesta demokrasi, politik uang harus dihentikan dan dihindari dengan adanya hubungan asosiatif. antara masyarakat dan nilai-nilai kearifan lokal dengan pemerintah melalui peran dan fungsi yang adaptif. Lembaga sosial yang berwenang.

Kata Kunci: Konflik, Resolusi, Demokrasi

Abstract. Elections for Regional Heads always experience the complexity of problems that lead to prolonged social conflicts without massive evaluation to minimize them. Not a few also happened, which involved various society and government institutions that participated in the contest. The research objective was to analyze and find the resolution of conflicts in Bulukumba Regency due to the democratic party of the Regional Head General Election. The research method is presented in a descriptive qualitative form with a case study approach. Primary and secondary data sources with data collection techniques, observation, interviews, and documentation. The analysis was data carried out through reduction, presentation, verification, and conclusions based on the data's validity. Among the conflict resolutions formulated, namely: a) local wisdom is the locomotive of peace to minimize social conflicts that lead to social disintegration. The implementation stage is a collective awareness built by the local community itself as an essential building for existing values and norms, b) The adaptation roles and of institutional functions in breaking down and applying rules is a potential superior as a latent function and a real function in preventing social conflicts that will occur, both micro and macro aspects that lead to movements preventive, persuasive and repressive role, and c) To suppress behavior deviant during the democratic party process, *money politics* must be stopped and avoided by the

existence of associative relationships between the community and local wisdom values and the government through adaptive roles and functions. Institution authorized social.

Keyword: Conflict, Resolution, Democracy.

Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Dinamika konflik dan usaha penyelesaian konflik dari berbagai bentuknya, memiliki strategi yang akan diambil sebagai keperluan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menentukan strategi pengambilan tindakan yang berkaitan dengan konflik sosial tersebut. Langkah utama tersebut dalam konteks mediasi dan resolusi konflik sering disebut dengan analisis konflik sosial. Proses sosialisasi dan penyelesaian pada sengketa di moment Pemilihan Umum khususnya yang ada di daerah ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Peran eksternal dalam kasus konflik Pemilihan Kepala Daerah khususnya lembaga pemerintah pusat menjadi salah satu pihak strategis dan signifikan, apakah dapat menjadi sebuah pengentas dan resolusi konflik atau sebaliknya. Pada dasarnya, konflik tidak bisa dihindarkan karena sejauh berdirinya sebuah partai pasti terdapat kepentingan-kepentingan pribadi yang berbeda satu sama lain.

Pada pelaksanaan pesta demokrasi, konflik merupakan sebuah keniscayaan karena setiap individu atau kelompok sosial memiliki kepentingan, pemahaman yang berbeda pada sisi lain demokrasi juga diyakini oleh sebagian orang sebagai sarana untuk mentransformasikan konflik. Meski dengan demikian demokrasi dan konflik merupakan dua hal yang tak bisa dihubungkan, perbedaan pandangan atau pendapat seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik sosial oleh dua kelompok dan partai. Hal ini membuktikan bahwa, pada penerapan dan realisasi politik demokratis belum mampu membawa masyarakat sampai kepada kedewasaan untuk saling menerima perbedaan dan kesiapan menerima kekalahan dalam kompetisi suara terbanyak. Konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan,

kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.

Salah satu konsep dasar dari ilmu politik adalah konflik, sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa terlepas dari interaksi dengan orang lain utamanya dalam pemenuhan hasrat maupun tujuannya yang ingin dicapai. Karena konflik itu sendiri merupakan bagian dari tak terpisahkan dengan status sosial yang ada pada masyarakat. Lawang dalam (Rusdiana, 2019) "Konflik adalah perjuangan memperoleh status, nilai, kekuasaan, di mana tujuan mereka yang berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya". Maka Lawang disini memberikan instrumental bahwa pada proses sosial yang dilakukan manusia dalam mencapai tujuannya yang melibatkan kelompok masyarakat, sebagai bagian dari kebersamaan adalah tidak dapat terpisah dari adanya konflik dari dinamika sosial yang terjadi dan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat itu sendiri. (Wahyudi, 2015) bahwa Konflik juga bisa memicu adanya sikap berseberangan (oposisi) antara kedua belah pihak dimana masing-masing pihak memandang satu sama lainnya sebagai lawan/penghalang dan diyakini akan mengganggu upaya tercapainya tujuan dan tercukupinya kebutuhan masing-masing. Sehingga konflik sosial dapat diartikan sebagai bentuk interaksi yang ditandai oleh keadaan yang saling mengancam, melukai, menghancurkan dan melenyapkan di antara pihak-pihak yang terlibat konflik tersebut. Konflik sosial jika dilihat dari segi positifnya yaitu konflik dapat mengawali terjadinya perubahan. Biasanya konflik sosial terjadi akibat adanya pertentangan antara kelompok sosial terhadap kondisi yang tidak menguntungkan. Kelompok yang merasa tidak diuntungkan, menuntut perubahan dan jalan yang ditempuh dengan menentang jalan yang ada.

Konflik atau pertentangan pada kondisi tertentu mampu mengidentifikasi sebuah proses pengelolaan lingkungan dan sumber daya yang tidak berjalan secara efektif, mempertajam

gagasan, bahkan dapat menjelaskan kesalahpahaman, karena pertentangan kepentingan diantara anggota organisasi atau dalam komunitas masyarakat merupakan suatu kewajiban. Coser dalam (Dodi, 2017) “if the social system is flexible enough to adjust to conflict situations we will deal with change within the system. I~ on the other hand, the social system is not able to adjust itself and allows the accumulation of conflict, the 'aggressive' groups, imbued with a new system of values which threatens to split the general consensus of the society and imbued with an ideology which 'objectifies' their claims, may he come powerful enough to overcome the resistance of vested interests and bring about the breakdown of the system and the emergence of a new distribution of social values”. (Dodi, 2017) Jadi jika sistem sosial cukup dinamis untuk menyesuaikan dengan situasi konflik, maka perubahan dalam sistem itu akan dihadapi. Selain itu, sistem sosial tidak dapat menyesuaikan diri dan memungkinkan terjadinya konflik karena terilhami sistem nilai baru yang mengancam untuk memisahkan masyarakat hingga terbentuklah ideologi untuk mengatasi hambatan dari kepentingan pribadi dan membawa rincian sistem dan munculnya nilai-nilai sosial baru.

Pemilihan Umum merupakan salah satu momentum penting dalam menentukan pemimpin secara langsung, proses berlangsungnya pesta demokrasi yang biasa dikatakan sebagai “pesta rakyat” secara hierarki dari pusat hingga daerah-daerah yang ada di Indonesia, senantiasa mengalami kompleksitas permasalahan tersendiri sehingga mengarah pada konflik sosial berkepanjangan tanpa ada evaluasi massif untuk meminimalisir hal tersebut. Bahkan tidak sedikit yang terjadi melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintahan yang ikut serta menjadi bagian dari konflik. Hal ini terkadang dipicu oleh ketidaksiapan mental dalam merajut kebersamaan dan membangun persamaan dalam perbedaan. Sehingga fanatik-primordialisme lebih ditonjolkan dibandingkan dengan rasio dalam bertindak, sehingga berdampak pada politik identitas. Barker (2004) dalam (Nawir & Mukramin, 2019) bahwa identitas etnis juga dapat menjadi basis bagi suatu kelompok masyarakat ketika menyuarakan tuntutan (aspirasinya). Melalui politik identitas, kelompok identitas etnis akan melakukan upaya untuk mendapatkan pengakuan politik serta upaya afirmasi atas kelompok mereka yang

tersubordinasi di masyarakat. Oleh karena itu, hal ini dapat menimbulkan konflik sosial baik secara vertikal maupun horizontal.

Berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah pada setiap momentumnya, senantiasa meninggalkan luka mendalam dan peristiwa memilukan dengan terjadinya konflik sosial antar masyarakat baik pada level mikro maupun makro, bahkan konflik antar Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam kehidupan nyata maupun kehidupan Media Sosial. (Amruddin, 2020) menyatakan konflik seringkali terjadi dalam proses interaksi antar-individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang masing-masing disebabkan oleh perbedaan baik dalam latar belakang interaksi, kemampuan berinteraksi, maupun tujuan berinteraksi. Tidak terkecuali konflik juga terjadi pada masyarakat Indonesia yang mempunyai latar belakang politik, etnis, dan agama yang berbeda. Dari latar belakang yang beragam ini, corak konflik di Indonesia Pun juga beragam. Hal ini berdasarkan beberapa peristiwa konflik yang berbuntut pada kekerasan dan kerusuhan misalnya di Kabupaten Tuban Jawa Timur pada tahun 2006, pasca pemilihan Bupati, berdampak pada sejumlah sarana pemerintah dan swasta hangus terbakar akibat aksi massa, demikian pun sebelumnya pada Pemilihan Walikota Kota Depok. Pada konteks pemilihan Gubernur, serta konflik pasca pemilihan Kepala Daerah, demikian pun pada pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku Utara yang berbuntut konflik dan polemik hukum berkepanjangan. Keadaan yang sama pula pasca Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan di tahun 2009 yang membuat kondisi provinsi kurang baik bidang keamanan dan stabilitas terganggu.

Salah satu media sosial yang tidak luput dari terjadinya konflik yang diakibatkan isu SARA adalah aplikasi ruang obrolan (chat room) WhatsApp. Dalam aplikasi WhatsApp seseorang dapat mengirim dan menerima berbagai macam media antar pengguna seperti teks, foto, video, dokumen, lokasi, juga panggilan suara, dan video (Kharisma, 2017). Hal ini banyak dipicu oleh adanya ketidakpastian regulasi pemilihan dan aturan, di samping ketidaktegasan sistem yang telah dibuat untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagai efek jera. Sebagaimana halnya di atas, peristiwa konflik yang ada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi selatan Indonesia, dipicu juga adanya ketidakpuasan oleh salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah, sehingga tidak

terlepas dari dinamika konflik dan politik dari berbagai kelompok-kelompok yang melakukan manuver komunikasi yang mengantarkan pada kebencian oleh kelompok tertentu kepada kelompok yang lain atas dasar kepentingan diri atau kelompoknya semata. Hal ini tentu juga menimbulkan sebuah persoalan lain. (Retnowati, 2015) mengatakan meraih keuntungan bagi pribadi telah menjadi ajang industri politik. Sedangkan ajang politik yang seharusnya diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak terlaksana dan tidak terpenuhi. Penyebab sikap apatis pada rakyat terhadap setiap proses demokrasi. Persepsi rakyat terhadap pemilu dan Pilkada akan terdegradasi pada anggapan bahwa proses demokrasi tersebut semata-mata hanya menguntungkan pihak elit politik saja.

Menilik dari berbagai konflik yang terjadi di Sulawesi Selatan sebagai wilayah potensi konflik. (Amruddin, 2020), Di Sulawesi-Selatan potensi konflik pemilukada seringkali terjadi pada masyarakat, yang membawa gesekan pada level elit sehingga tujuan dari pemilukada yang damai dan adil seringkali jauh dari tujuan dari Undang-Undang Pemilu. Konflik tak terhindarkan yang terjadi di Kabupaten Pangkep tahun 2005, massa pada saat itu menyegel kantor KPU. Selain itu, di Kabupaten Toraja dan Kabupaten Soppeng tahun 2008. Terjadi amukan massa yang berdampak pada penyegelan kantor KPU dan rusaknya kertas suara yang dibakar oleh massa. Maka hal ini juga terjadi Khususnya di Kabupaten Bulukumba akibat dari adanya Pemilihan Kepala Daerah, terjadi berbagai pertentangan yang sulit teridentifikasi dan senantiasa berulang dengan motif yang sama dan sebagiannya berbeda, hal ini terlihat dari dua sumber unsur utama yang memiliki peran penting dalam potensi konflik dan penyelesaian konflik itu sendiri yaitu, lembaga independen unsur pemerintahan meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemutus sengketa di pengadilan. Kemudian unsur masyarakat itu sendiri, meliputi pendukung masing-masing calon Kepala Daerah, terklasifikasi dalam Tim Sukses, Unsur Pegawai Negeri Sipil, dan rakyat biasa (kaum dewasa/orang tua dan kaum remaja). Dari kedua unsur utama ini, dapat di memicu konflik bak bom waktu. Faktor penyebab konflik yang terjadi selama ini tidak hanya sengketa hasil penghitungan suara yang terjadi dalam Pemilihan

Kepala Daerah, seperti permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bulukumba, permasalahan pencalonan baik terjadinya permasalahan di internal partai politik maupun pemenuhan persyaratan Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, motif harga diri pribadi (adu popularitas); Ada pula yang bermotif mengejar kekuasaan dan kehormatan; Terkait juga kehormatan Partai Politik pengusung; Harga diri Ketua Partai Daerah yang sering memaksakan diri untuk maju. Di samping tentu saja ada yang mempunyai niat luhur untuk memajukan daerah, sebagai putra daerah. Dalam kerangka motif kekuasaan bisa dipahami, karena Politik merupakan perjuangan untuk memperoleh alokasi kekuasaan di dalam masyarakat). Untuk mendapatkan prestise seperti yang terurai di atas maka cara-cara "*lobbying, pressure, threat, bargaining and compromise*" seringkali terkandung di dalamnya, dengan berbagai persoalan tersebut, inilah kemudian peneliti tertarik untuk melihat dengan merumuskan persoalan upaya apa yang dilakukan untuk "Resolusi Konflik Terhadap Pesta Demokrasi (Analisis Sosio-Politik Pemilihan Kepala Daerah di Bulukumba)".

METODE

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bulukumba dengan fokus kajian adalah penyelesaian masalah yang terjadi sebagai upaya resolusi konflik terhadap pesta demokrasi dalam tinjauan Analisis Sosio-Politik Pemilihan Kepala Daerah. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi atas peristiwa konflik dampak dari Pemilihan Kepala Daerah.

Sumber data yang diperoleh melalui pengumpulan data langsung (primer) dan data tidak langsung (sekunder) yang diperoleh melalui artikel, majalah, buku dan bukti dokumentasi lainnya, sehingga data disajikan dalam bentuk naratif. Sebagai upaya pendukung dalam mengumpulkan data, Peneliti sebagai instrumen utama (*human instrument*) dalam mengonsep, mengkaji, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan menyimpulkan dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, instrumen dokumentasi dan catatan observasi, alat perekam dan kamera, terhadap peristiwa yang terjadi dan penentuan informan secara *purposive sampling* sebanyak 9 orang. Adapun bentuk analisis data yang digunakan yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan

berdasarkan keabsahan data menggunakan langkah triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sengkarut Sosial dan Resolusi Konflik di Kabupaten Bulukumba

1) Sengkarut Sosial

Perseteruan dalam dunia politik, bagian dari dinamika sosial yang mengarah pada adanya perjuangan, kompetisi dan pertentangan. Tidak terpujikan pada realitanya, tidak sedikit yang mengikuti proses demokrasi yang melalui Pemilihan Umum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai calon atau partisipan pemilih. Akan tetapi, tidak siap secara mental dalam menerima kenyataan kekalahan sehingga berakhir pada keterlibatan ketegangan sampai pada kerusakan tingkat tinggi yang berdampak pada pengrusakan fasilitas umum dan infrastruktur lainnya karena ketidakpuasan dengan hasil akhir yang diperoleh.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, seiring berkembangnya hajat hidup dan kebutuhan manusia dalam meningkatkan prestise dan status sosial secara instan dan melakukan berbagai cara dan upaya agar bisa memiliki kekuasaan dan kedudukan di dalam masyarakat, maka pendongkrak popularitas melalui jalur poros politik merupakan salah satu jalan untuk memperoleh hal tersebut. Sehingga tujuan politik sebagai upaya untuk memperoleh pemimpin yang adil dan bijaksana serta mampu mensejahterakan rakyat, “jauh panggang dari api”, artinya setelah memperoleh kekuasaan maka hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan, berakibat polemik dan sengkarut sosial berkepanjangan. Hal ini pula berbanding terbalik dalam kompetisi Pemilihan Kepala Daerah jika tidak mampu menerima kekalahan dan ketidakmampuan lembaga pemilihan pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Maka bisa akibat pada konflik berkepanjangan, keresahan, kesengsaraan dan merugikan masyarakat umum. Karena kecepatan mobilitas kehidupan, banyak dijumpai disekitar kita orang-orang yang tidak sanggup bertahan menghadapi kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam kehidupannya.

2) Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah

Damai secara sederhana dapat dimaknai sebagai tidak adanya perang atau konflik dan kekerasan. Faktor penyebab terjadinya suasana

damai adalah ketika individu memiliki rasa kedamaian dalam diri sendiri, memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi dan pikirannya agar tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain serta bisa memicu terjadinya konflik dan kekerasan. Perdamaian adalah konsep dan cara pandang yang positif baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain (Machali, 1970; Sulong & Machali, 2017).

Konflik tidak dapat dihilangkan ditengah-tengah masyarakat melainkan diminimalisir melalui analisis dan dideteksi sejak dini, maka peran pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam pengentasan konflik sosial tersebut, dengan memperhatikan ciri-ciri terjadinya konflik menurut (Sumaryanto, 2010) sebagai berikut: a) Paling tidak ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok terlibat dalam suatu interaksi yang saling berlawanan, b) Saling adanya pertentangan dalam mencapai tujuan, c) Adanya tindakan yang saling berhadapan akibat pertentangan, d). Akibat ketidakseimbangan.

Adapun jenis-jenis konflik sosial yang senantiasa ada ditengah-tengah masyarakat menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel; Wirawan dalam (Muspawi, 2014) membagi lima jenis konflik diantaranya yaitu: a) *Konflik Intrapersonal*. Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus, b) *Konflik Interpersonal*. Konflik Interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja dan lain-lain. Konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi. Karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak bisa tidak akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut, c) *Konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok*. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas, yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh dapat dikatakan bahwa seseorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat mencapai norma- norma produktivitas kelompok dimana ia berada, d) *Konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama*. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di

dalam organisasi- organisasi. Konflik antar lini dan staf, pekerja dan pekerja – manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok, e) *Konflik antara organisasi*. Contohnya seperti di bidang ekonomi dimana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru, teknologi baru dan servis baru, harga lebih rendah dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien.

Maka upaya resolusi konflik berdasarkan analisis sosio-politik yang dibangun harus benar-benar kuat dan memiliki dasar hukum yang jelas berkeadilan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, karena mencakup hajat hidup orang banyak. Menurut Stevenin dalam (Muspawi, 2014) bahwa terdapat lima langkah meraih kedamaian dalam konflik. Apapun sumber masalahnya, lima langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan: a) Pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi (tidak memperdulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada), b) Diagnosis. Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele, c) Menyepakati suatu solusi. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik d) Pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Namun hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu, e) Evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi.

Adapun diantara strategi atau langkah-langkah sebagai upaya Resolusi Konflik yang dapat dilakukan untuk meminimalisir konflik akibat adanya pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulukumba yaitu:

1. Penguatan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik Sosial

Jika merujuk pada kohesifitas dan primordialisme kehidupan bahwa masyarakat yang hidup dalam sebuah wilayah sama yang cukup lama dan melahirkan sebuah kebiasaan dan budaya tertentu, maka ikatan normatif primordialisme dengan sendirinya akan melahirkan nilai dan norma sebagai penciri masyarakat tersebut dan timbulnya kearifan lokal sebagai katup penyelamat dan upaya pengentas perbedaan, perselisihan yang mengarah pada perpecahan.

Kearifan lokal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah bagian kemasyarakatan, maka kearifan lokal menurut (Jati, 2013a, 2013b) bahwa dapat diartikan sebagai ruang maupun arena dialogis untuk melunturkan segala jenis eksklusivitas politik identitas yang melekat di antara berbagai kelompok. Adanya upaya menjembatani berbagai lintas kepentingan tersebut adalah upaya untuk membangun inklusivitas dalam meredam potensi konflik yang lebih besar lagi. Selain itu, (Mudzakir & Sudrajat, 2016) bahwa kearifan lokal secara intrinsik menyediakan adanya unsur kohesivitas berupa elemen lintas kepercayaan, lintas agama, lintas budaya, dan lintas warga. Dalam hal ini, kearifan lokal bisa dimaknai sebagai arena dialogis untuk mencairkan sisi eksklusivitas politik identitas yang melekat di antara berbagai kelompok komunitas. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun inklusivisme dan meredam potensi konflik yang lebih besar. Keberadaan kearifan lokal sebagai manifestasi penetrasi disparitas diantara adanya perbedaan dari berbagai sudut perbedaan, sehingga keberadaannya sangat vital untuk membangun kebersamaan dan persatuan. Kearifan lokal sifatnya lebih kepada *soft*, mengajak, mengayomi dengan penuh kesadaran dengan rasa memiliki tanpa ada unsur paksaan dari lingkungan luar yang ada sehingga mampu mengelola konflik menjadi nirkekerasan. Jadi realisasi penerapan kearifan lokal dengan penerapan hukum positif memiliki dua hal yang berbeda, hukum positif lebih kepada memaksa, sedangkan kearifan lokal sebaliknya. Jadi secara sosio-kultural hal inilah yang perlu ditumbuhkembangkan di Kabupaten Bulukumba sebagai wilayah yang memiliki kearifan lokal dan pelestarian budaya sebagai daerah wisata pantai dan Suku unik (Kajang) yang ada di dalamnya. Maka hal inilah yang merupakan sebagai modal sosial bagi masyarakat Bulukumba untuk tetap dijaga dan dilestarikan

untuk meminimalisir konflik sosial akibat dari adanya Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah.

2. Penguatan Peran, Fungsi Adaptif Lembaga Pemilihan dalam Penyelesaian Konflik

Pesta demokrasi melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disebut juga dengan Pilkada atau Pemilukada merupakan Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Politik atau koalisi parpol dan perseorangan (independen). Selain itu, Pemilihan Kepala Daerah merupakan pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para masyarakat daerah setempat yang telah memenuhi persyaratan administratif.

Peran serta Lembaga Pemilihan Umum dalam upaya penyelesaian konflik sebagai bagian dari tugas kelembagaan dan kenegaraan dalam menjaga stabilitas keamanan dan keseimbangan selama berlangsungnya proses pesta demokrasi, hal ini sangat diperlukan, karena Lembaga tersebut memiliki hak Undang-Undang dalam penyelesaiannya. Adapun diantara Lembaga tersebut diantaranya adalah:

a) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Adapun tugas, wewenang, kewajiban, Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Banyak sekali kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Kendala-kendala tersebut meliputi kendala yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis yang dialami Komisi Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan dasar hukum pembentukannya yaitu pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang tidak menyebutkan nama Komisi Pemilihan Umum secara pasti.

Proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah masing-masing. Tugas yang

dilaksanakan KPUD ini sangat berat yaitu mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ini agar dapat terlaksana dengan demokratis. Mulai dari seleksi bakal calon, persiapan kertas suara, hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ini. Pelaksanaannya selalu saja ada masalah yang timbul, seringkali ditemukan pemakaian ijazah palsu oleh Bakal Calon. Hal inilah membuat masyarakat berasumsi pesimis bahwa karena mulai dari awal saja sudah menggunakan cara yang tidak benar. Dan juga biaya untuk menjadi calon yang tidak sedikit, jika tidak ikhlas ingin memimpin maka tindakan yang pertama adalah mencari cara bagaimana supaya uangnya dapat segera kembali atau “balik modal”.

b) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Ketegasan rakyat Indonesia menuntut reformasi politik telah ditunjukkan dalam gerakan rakyat (*people power*) di sejumlah Kota di Indonesia pada bulan Mei 1998. Ketegasan itu berangkat dari kenyataan selama rezim Orde Baru, rakyat Indonesia merasakan berbagai akibat buruk dari praktik demokrasi prosedural, seperti penyelenggaraan Pemilu 1971 sampai 1997 yang tidak sesuai dengan asas dan prinsip pemilu demokratis. Dilihat dari tujuannya, tuntutan itu bermaksud memperbaiki kehidupan politik melalui konsistensi pelaksanaan demokrasi berupa penyatuan praktik demokrasi prosedural dengan demokrasi substansial. Meskipun demikian praktik demokrasi substansial bukanlah hal mudah.

Secara politis pembentukan Bawaslu pada tahun 2008 dengan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan pemilu berupa pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, serta kewenangan penyelesaian sengketa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bertujuan untuk memastikan dua hal pokok, yaitu:

- a. Keberadaan suatu penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri, tetap, dan nasional, yaitu penyelenggara pemilu yang profesional, spesialis, dan berintegritas: transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif dalam melaksanakan pengawasan pemilu.
- b. Seluruh proses dan hasil penyelenggaraan pemilu sesuai asas dan prinsip umum pemilu demokratis: langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif.

Untuk tujuan itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberi mandat kepada Bawaslu sebagai

Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Melalui tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan pemilu.

c) Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditaati dan ditegakan dengan setegak-tegakannya sekaligus dalam rangka mengendalikan, mengawal dan mengarahkan proses demokrasi kehidupan kenegaraan kita berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sebagai pengawal konstitusi dan pengarah demokrasi, MK juga berfungsi sebagai penafsir tertinggi atas UUD NRI Tahun 1945 melalui putusan-putusannya sebagaimana mestinya. Karena itu, dapat dikatakan kedudukan dan peranan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam rangka bekerjanya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia di masa yang akan datang, guna mendukung upaya membangun kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita yang semakin demokratis, damai, sejahtera, mandiri, bermartabat, dan berkeadilan.

Mulai masa pemilihan umum, MK telah banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif maupun Presiden. Pemilu merupakan cara yang ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang untuk memilih pejabat negara, oleh karena itu hal penting yang fundamental dalam keberlangsungan pemerintahan seperti ini adalah sangat tepat apabila terjadi perselisihan hasil Pemilu diberikan kepada badan peradilan yang dibentuk khusus untuk mengawal konstitusi.

3. Pengendalian Politik Uang (*Money Politics*)

Dinamika sosial dan politik dewasa ini telah memasuki hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pada lapisan masyarakat paling bawah (akar rumput). Maka dari itu, pendidikan politik hendaknya diposisikan dalam konteks sosial politik dan budaya, agar tidak terjadi benturan-benturan yang mengarah pada terjadinya turbulensi sosial, yang pada akhirnya menyebabkan penderitaan bagi masyarakat yang berkepanjangan karena konflik yang tak kunjung selesai. Selain itu, kurang maksimalnya realisasi manajemen dan resolusi konflik setiap kali berlangsungnya pesta demokrasi.

Pada kontestasi demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba, konflik yang terjadi merupakan pertentangan, ketidaksepahaman antara dua atau lebih individu atau dua kelompok sebagai akibat dari usaha kelompok lainnya yang mengganggu pencapaian tujuan. Pada realitanya, secara geografis dan etnografis, Kabupaten Bulukumba merupakan masyarakat multikultural terdiri dari berbagai etnis, suku, budaya dan agama, hal ini menjadikan Kabupaten tersebut sebagai wilayah yang berpotensi besar adanya konflik di Sulawesi Selatan. Selain itu, pada aspek pendidikan, agama yang masih terbilang rendah, apalagi yang masih hidup di pedesaan yang terpencil dan jauh dari kehidupan Kota, maka hal ini menjadikan masyarakat jauh dari pendidikan politik berdasarkan apa yang diharapkan, termasuk pada proses sosialisasi politik yang kurang maksimal. Maka proses demokrasi yang terjadi senantiasa diwarnai dengan konflik sosial atas dasar kepentingan pribadi, kelompok dan politik uang (*money politics*), baik pada Pemilihan Umum Legislatif maupun Eksekutif, akibat dari konflik tersebut, tidak sedikit memakan korban bahkan merenggut nyawa. Konflik sosial yang ditengarai dengan konfrontasi adu kekuatan, jumlah massa dan popularitas dengan sentilan provokatif baik melalui media atau langsung maka menyulut amarah masyarakat, pendukung salah satu calon, dan mudah terhasut sehingga membuat pertentangan menjadi sengit dan berpotensi untuk terjadinya kerusuhan besar, hal ini juga, tidak terlepas dari sikap dan kualitas tim sukses yang melakukan mobilisasi massa secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan fakta yang terjadi apabila dalam pemilihan umum kepala daerah langsung masih terjadi kecurangan, konflik-konflik dan terutama *money politics* maka dampak positif dari pemilihan umum kepala daerah yang hendak dicapai maka akan terbentuk karena suara rakyat tidak ada lagi dan suara rakyat ternyata bisa dibeli dengan uang. Dampak negatif dari pemilukada langsung terhadap pelayanan publik dan penyelenggara pemerintahan adalah pertama tingginya kemungkinan kepala daerah untuk mengembalikan ongkos politik pemilukada langsung melalui APBD sebagai akibat *money politics* yang dilakukan selama proses pemilukada langsung.

Maka dari itu, peran serta masyarakat dan Lembaga Pemilihan Umum dan kenegaraan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang mengakibatkan kerusuhan dan

konflik berkepanjangan tanpa dan penyelesaian masalah yang jelas dengan melakukan pencegahan sejak dini dan persuasif. Maka konsep Marxis pada konflik Pemilihan Kepala Daerah dalam penelitian ini adalah banyaknya konflik yang terjadi ketika proses pemilihan berlangsung. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh para kandidat untuk memenangkan pilkada sebagai kepala daerah dilatarbelakangi oleh sifat alamiah manusia yang selalu ingin menguasai orang lain untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan, walaupun diperoleh dengan cara yang tidak benar termasuk *money politics*.

SIMPULAN DAN SARAN

Suatu konflik politik dapat dilihat dalam suatu fenomena yang terjadi karena perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok dimana adanya perbedaan pandangan. Pemilihan Umum Kepala Daerah sering disebut sebagai pesta demokrasi rakyat yang menjadi cerminan karena keikutsertaan masyarakat dalam menentukan pemimpin dan arah perkembangan suatu bangsa. Akan tetapi, jika Pemilihan Umum melahirkan sebuah potensi konflik maka seharusnya ada kebijakan dan perumusan sosial kontrol sebagai upaya Resolusi Konflik yang bersifat mengikat. Adapun resolusi konflik berdasarkan hasil penelitian tentang konflik yang terjadi selama berjalannya Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bulukumba yaitu: a) Penguatan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik Sosial. Pada masyarakat yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya, maka Kearifan Lokal sebagai lokomotif perdamaian untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial yang berujung pada disintegrasi sosial. Maka tahapan pengimplementasiannya adalah adanya kesadaran kolektif yang dibangun oleh masyarakat lokal itu sendiri sebagai bangunan dasar nilai dan norma yang ada, b) Penguatan Peran, Fungsi Adaptif Lembaga Pemilihan dalam Penyelesaian Konflik. Adaptif peran dan fungsi lembaga dalam mengurai dan menerapkan aturan merupakan potensi besar sebagai fungsi laten dan fungsi manifes dalam pencegahan konflik sosial yang akan terjadi, baik aspek mikro dan maupun makro yang mengarah pada gerakan peran preventif, persuasif dan represif, dan c) Pengendalian Politik Uang (*money politics*). Pada tahapan ini, untuk menekan terjadinya perilaku menyimpang selama proses pesta demokrasi berlangsung maka

money politics harus ditekan dan dihindari dengan adanya hubungan asosiatif oleh masyarakat dengan nilai kearifan lokalnya dan pemerintah melalui adaptif peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial yang bertugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amruddin, A. (2020). PILKADA SERENTAK DAN POTENSI KONFLIK DI SULAWESI-SELATAN. *Jurnal Arajang*. <https://doi.org/10.31605/arajang.v3i1.584>
- Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. In *Kencana*.
- Cresswell, J. W. (2017). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi ketiga. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Dodi, L. (2017). SENTIMENT IDEOLOGY: MEMBACA PEMIKIRAN LEWIS A. COSER DALAM TEORI FUNGSIONAL TENTANG KONFLIK (Konsekuensi Logis Dari Sebuah Interaksi di Antara Pihak Jamaah LDII Dengan Masyarakat Sekitar Gading Mangu-Perak-Jombang). *Jurnal Al- 'Adl*, 10(1), 104–124.
- Hariyani, H. (2018). MODEL KAMPANYE PILKADA ATASI POLITIK UANG DAN SIKAP PESIMIS PEMILIH (Telaah teoritis dan konsep implementasinya). *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*. <https://doi.org/10.30659/jikm.6.2.178-193>
- Jati, W. R. (2013). KEARIFAN LOKAL SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK KEAGAMAAN. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.251>
- Kharisma, T. (2017). Konflik SARA pada Pilkada DKI Jakarta di Grup WhatsApp dengan Anggota Multikultural. *Jurnal Penelitian Komunikasi*. <https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.233>
- Machali, I. (1970). Peace education dan deradikalisasi agama. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 41. <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.41-64>
- Mudzakkir, M., & Sudrajat, A. (2016). Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Jawa

- Timur: Sebuah Tinjauan Awal. *Seminar Nasional "Revitalisasi Kearifan Lokal Untuk Membangun Martabat Bangsa"*, May 2016.
- Muspawi, M. (2014). Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*.
- Nawir, M., & Mukramin, S. (2019). Identitas Etnis Dalam Ranah Politik. *Phinisi Integration Review*.
<https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10090>
- Retnowati, E. (2015). PUSARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG. *Perspektif*.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i1.140>
- Rusdiana, A. (2019). Manajemen Resolusi Konflik: Sebuah Tawaran Dalam Islam. *Jurnal Educationem*, 1(01), 73–92.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods). In *Alfabet*.
- metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Alfabeta, cv. ____ (2016).
- Sulong, M. K., & Machali, I. (2017). Dampak Konflik Dan Resolusi Konflik Terhadap Sistem Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Songserm Islam Seksa Patani, Thailand Selatan. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 17(2), 147.
<https://doi.org/10.18860/ua.v17i2.3546>
- Sumaryanto. (2010). Manajemen Konflik Sebagai Salah Satu Solusi Dalam Pemecahan Masalah. *OPPEK Dosen UNY*.
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan. *Jurnal Publiciana*.
- Widodo, W. (2015). Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila. *Civis*.